

# Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Murtiani <sup>1\*</sup>, Lilik Handajani <sup>1</sup>, Iman Waksito <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

[Murtianiyani01@gmail.com](mailto:Murtianiyani01@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*The number of cases of village fund misuse continues to increase annually. The Siskeudes application is used as a way out of the problems faced in village financial management. Using the Siskeudes application can increase effectiveness and improve the accountability and transparency of village financial management. The effectiveness of Siskeudes is explored with a descriptive qualitative research approach and an intrinsic case study as a research design—data collection through observation, interviews, and documentation with 18 informants with a purposive sampling method. A credibility test was used to see the effectiveness; the data was analyzed using the intrinsic model. The effectiveness of the Siskeudes application is measured based on several components: the appropriateness of the information requested in the template or program, the appropriateness of report types, the accuracy and timeliness of reports, the appropriateness of requirements, processes, and procedures, and feedback. The Siskeudes program aids in monitoring the accountability of village finance management through vertical and horizontal reporting. The indicators used to measure transparency are the availability of clear information about procedures, costs, and responsibilities, as well as access to information that is ready, easily accessible, freely available, and timely. The results of this study indicate that using the Siskeudes application helps increase the accountability and transparency of village financial management when measured using these two indicators. In addition, Human Resources (HR) influences increased accountability and transparency to reduce the misuse of village funds in village financial management. This research provides insight and knowledge about the effectiveness of implementing the Siskeudes application in increasing accountability and transparency, which are influenced by the capabilities of Human Resources (HR) and the use of technology.*

---

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Efektivitas;  
Akuntabilitas;  
dan  
transparansi

*Jumlah kasus penyalahgunaan dana desa terus mengalami kenaikan setiap tahun. Penggunaan aplikasi Siskeudes dijadikan sebagai sebuah jalan keluar atas problem yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan aplikasi siskeudes dapat meningkatkan keefektifan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Efektivitas dari siskeudes ini digali dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan intrinsic case study sebagai desain penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 18 informan*

---

*dengan metode purposive sampling. Uji kredibilitas untuk melihat keefektifan, data yang dianalisis menggunakan model intraktif. Efektivitas dari aplikasi Siskuedes diukur berdasarkan beberapa komponen: kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu laporan, kesesuaian persyaratan, proses dan prosedur, dan umpan balik (feedback). Pelaporan yang dilakukan secara vertikal dan horizontal yang digunakan sebagai indikator untuk memantau akuntabel dari pengelolaan keuangan desa yang dibantu dengan aplikasi Siskeudes. Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ialah tersedianya informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggungjawab serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes membantu peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa jika diukur menggunakan kedua indikator tersebut. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu mengurangi penyalahgunaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas implementasi aplikasi Siskeudes dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang dipengaruhi oleh kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penggunaan teknologi.*

---

## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban atau menerangkan kinerja serta tindakan suatu badan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah laporan atas pengelolaan keuangan desa dengan berupa laporan keuangan. Transparansi merupakan memberikan informasi yang terbuka dan secara jujur kepada semua kalangan yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi yang dimaksud dalam hal ini ialah sikap keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat selaku pihak yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka tentang pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana tuntutan dari Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 39 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar kepada pemerintah desa. Adapun jumlah anggaran dana desa yang dianggarkan tahun 2019 yakni 70 triliun dengan realisasi 99,6%, tahun 2020 yakni 71 triliun dengan realisasi 99,9% dan tahun 2021 yakni 72 triliun dengan realisasi 99%. Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa telah banyak terjadi penyelewengan. Pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi berjumlah 7 kasus, tahun 2020 jumlah kasus korupsi 9 kasus, tahun 2021 ada 13 kasus dan tahun 2022 ada 12 kasus korupsi yang terjadi Nusa Tenggara Barat. Atas kasus tersebut, menunjukkan dibutuhkan adanya antisipasi agar tidak terus mengalami kenaikan penyelewengan dana desa. Salah satu cara yang dilakukan untuk

mengantisipasi kasus korupsi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku badan yang mendapatkan mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional termasuk di dalamnya itu pengelolaan keuangan desa ialah dengan mencetuskan sebuah informasi akuntansi melalui sebuah aplikasi yang dikenal dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Dimana aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa dalam membuat pelaporan keuangan dan sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan aplikasi siskuedes dalam pengelolaan keuangan Desa didukung oleh beberapa hal, yaitu: pertama, dengan keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD/2015 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa, salah satunya mengamanatkan bahwa aplikasi Siskuedes diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Kedua, surat edaran dari komisi pemberantasan korupsi No. B, 7508/01-16/08/2016 yang ditujukan kepada Para kepala Desa di seluruh Indonesia yang berisi tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan Desa/Dana Desa, yang salah satu isinya adalah untuk “memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Siskuedes yang dikembangkan oleh BPKP bekerja sama dengan kemendagri untuk pengelolaan keuangan desa.

Desa Gelangsar adalah suatu Desa di Nusa Tenggara Barat, telah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2017. Siskeudes digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Gelangsar mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes sangat membantu pemerintah desa. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Aeni et al., (2022), Adhivinna et al., (2020), Restiti et al., (2019), (Asmawati & Basuki, 2019), Deliyanti et al. (2020), dan Bawono et al. (2020) yang hanya sebatas meneliti pada efektivitas dari penggunaan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes tepat waktu karena tersedia di database dan otomatis terlihat disana dengan satu kali input yang dibantu dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan Desa sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan Desa salah satunya didukung oleh Sumber Daya Manusia. Kurangnya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk aparat Desa. Kompetensi dan peran perangkat desa dapat mempengaruhi kualitas akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu hanya terbatas pada efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan dipengaruhi oleh peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, peneliti

melakukan penelitian terkait dengan asas dari pengelolaan keuangan desa yakni akuntabel dan transparan. dengan judul penelitian “efektivitas implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa”.

## METODE

Metodologi penelitian memegang peranan sangat penting dalam menentukan alur pemikiran dan prosedur yang akan diikuti dalam melakukan penelitian ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibahas. Peneliti merupakan alat utama dalam penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretive (Sugiyono, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi), informasi yang dihasilkan biasanya bersifat kualitatif, dan analisis data bertujuan untuk memahami makna, mengenali keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dengan menggunakan *intrinsic case study* untuk melihat peristiwa mengenai efektivitas dari implementasi aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti menggunakan studi kasus sebab peristiwa ini dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk melihat bagaimana efektivitas implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Intrinsic case study* ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu. Melalui penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan tujuan dan pertimbangan tertentu, untuk menentukan sumber datanya. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, Ketua RT, BPD dan Camat Gunungsari menjadi informan dalam penelitian ini. Uji kredibilitas digunakan untuk uji validitas data, dan model interaktif dengan empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gelangsar merupakan salah satu desa dari 16 (enam belas) Desa yang ada di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, merupakan Desa terpencil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan luas 1.900 Ha atau 6 ( $Km^2$ ) yang terdiri dari 6 (Enam) Dusun yaitu Dusun Gelangar, Dusun Gelangsar Timur, Dusun Lilir Utara, Dusun Apit Aiq, Dusun Songoran dan Dusun Geripak. Salah

satu pemekaran dari Desa Mambalan. Pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes telah diterapkan di seluruh desa di Kecamatan Gunungsari sejak tahun 2017. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Aplikasi Siskeudes untuk meningkatkan standar Pengawasan Keuangan Desa. Siskeudes diciptakan sebagai alat kontrol dan tolok ukur Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk membantu Pemerintah Desa dalam pelaporan keuangan. Hal ini menjamin bahwa semua peraturan perundang-undangan dipatuhi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mendiskusikan keuangan Desa dengan pihak-pihak terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai dasar dalam mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan pengelolaan keuangan priode selanjutnya. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa. Dimana Desa dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan dari proses sampai akhir dan mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang baik.

### **Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat**

Aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu Bendahara Desa dalam melaporkan Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran dan pemasukan yang berkaitan dengan Keuangan Desa harus dicatat oleh bendahara desa dengan disertai bukti-bukti berupa kuitansi. Bendahara Desa juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Siskeudes dapat menyediakan output berupa dokumen administrasi dan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik dan tahunan dengan hanya satu kali input.

Adapun hasil penelitian ini mendukung penelitian tentang efektivitas implementasi aplikasi Siskeudes yang dilakukan oleh Juardi et al., (2017), Adhivinna et al., (2020), Puspasari & Purnama (2018), Herawati & Hayati, (2020), Deliyanti et al., (2020), Maharani & Akbar (2020), Rasaili (2022), Dhika et al., (2022) Hasanah & Setiawati (2022), Asih & Pradana (2022), Loupatty, (2022), Aeni M et al., (2022), Hasliani & Yusuf, (2021), Pujiani et al., (2022) dan (Bawono et al., 2020) menyatakan penggunaan aplikasi Siskeudes sudah efektif dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi. Dengan temuan terbaru dilapangan yakni belum adanya pemisahan jabatan antara Bendahara Desa dan Operator Desa dengan tujuan untuk mengurangi kasus manipulasi data yang menyebabkan penyelewengan anggaran dana desa.

Dalam mengukur efektivitas dari pengelolaan keuangan Desa menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Amas et al., (2020) dan Aeni M et al. (2022) yaitu:

### **Kesesuaian informasi yang diminta dengan template/program.**

Keahlian atau kemahiran Bendahara Desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes dan aksesibilitas informasi yang diminta dalam template/program Siskeudes dapat digunakan untuk menentukan aksesibilitas informasi yang diminta dalam template/program. Menggunakan hasil diskusi dengan informan pendukung.

*“Ya, Sudah menguasai secara keseluruhan terkait dengan pengoperasian aplikasi siskeudes karena sudah mendapat pelatihan dari pihak kabupaten untuk penggunaan siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa. jika ada perubahan atau kendala yang dihadapi, biasanya kita melihat petunjuk teknis yang biasanya tersedia pada aplikasi tersebut dan mencari tutorial lain”*

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa salah satu elemen yang mendukung kecukupan data yang dibutuhkan oleh template/program adalah keahlian atau kemahiran Bendahara Desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian (Amas et al., 2020) dan (Aeni M et al., 2022) yang menemukan bahwa kemampuan dan pengetahuan untuk mengoperasikannya.

Empat kelompok menu yaitu Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan, tersedia di bawah menu "Menu Entri" pada aplikasi Siskeudes. Kelompok menu dan bagian menu ini mencakup informasi yang dicari oleh template/program. Informasi umum desa, visi dan misi desa, RPJM desa, dan RKP desa merupakan informasi yang wajib diisi pada menu perencanaan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) diperlukan untuk menu data Penganggaran. Kemudian, pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban kegiatan SPP diperlukan untuk informasi menu Penatausahaan. Buku Kas Umum Desa, Buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Pendapatan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Panjar, dan Kuitansi merupakan output utama. Selain itu, menu Pembukuan menghasilkan informasi tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (calk).

### **Kesesuaian jenis laporan**

Kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari penerapan jenis laporan yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes dalam membuat laporan pengelolaan keuangan desa. Untuk mencegah kesalahan entri, Bendahara Desa dan Kaur Perencanaan terlebih dahulu membuat laporan dengan manual untuk anggaran dan laporan mereka. Program Siskeudes menghasilkan laporan yang mengikuti pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Negri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan temuan wawancara, berikut ini:



*“Untuk data manual apa saja yang akan dibutuhkan untuk penginputan kedalam aplikasi Siskeudes itu data yang dibutuhkan yaitu RAB dan SK. Karena dalam penginputan data tersebut ada pada menu entri yang berisi mengenai data umum desa. Didalam data umum desa tersebut ada yang diisi tentang biodata perangkat desa, dari itu sebabnya dibutuhkan SK Desa. Terkait dengan RAB yang akan di input kedalam aplikasi Siskeudes itu terlebih dahulu kita melakukan pembuatan secara manual untuk menghindari kesalahan input. Sebab, satu angka yang berbeda atau tidak belence itu menjadi masalah bagi kita sehingga kita perlu sangat teliti dalam hal pembuatan RAB sampai dengan pertanggungjawabannya ”*

Jenis laporan yang harus dibuat oleh Bendahara Desa sudah tersedia pada menu “Laporan” pada aplikasi siskeudes. Jenis laporan yang dihasilkan merupakan *output* dari *input* yang dimasukkan dalam menu “Entri” aplikasi Siskeudes sebelumnya. Jenis laporan yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes sudah disesuaikan dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun jenis laporan yang dihasilkan oleh siskeudes adalah laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kompiliasi.

### **Ketepatan dan kepastian waktu laporan**

Waktu pelaporan yang akurat dan dapat diandalkan, serta sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan lainnya. Siskeudes menghasilkan *output* berupa laporan keuangan, dapat meningkatkan akurasi dan prediktabilitas tenggat waktu laporan dengan meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga membantu ketepatan dan ketergantungan waktu pelaporan.

*“Dengan menggunakan siskeudes tentu sangat membantu Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban baik perbulan, triwulan, semester, maupun pertahunan. Dengan sekali input akan menghasilkan sebuah laporan untuk melakukan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan maupun triwulan dan kepada bupati melalui camat untuk laporan persemester dan pertahunan. Namun dalam membuat laporan pada tahun 2022 ini terdapat kendala pada saya sebagai personal sehingga menyebabkan keterlambatan dalam membuat laporan kepada pemerintah kabupaten.”*

Sifat otomatis Siskeudes dan kemampuannya untuk menyediakan data secara instan dalam *database* dengan satu kali entri memungkinkan pelaporan keuangan desa dilakukan dengan cepat.

**Kesesuaian persyaratan, prosedur dan tahapan laporan.**

Pelatihan dan bimbingan teknis diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memulai programnya dalam membantu Pemerintah Desa mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa. Studi ini menunjukkan bahwa kesesuaian standar pengelolaan keuangan desa dengan pedoman dari BPKP dan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan prosedur pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan indikator sudah efektif dari kesesuaian persyaratan, proses, dan tahapan laporan pengelolaan keuangan desa.

*“Ya, tanpa diragukan lagi, aplikasi Siskeudes diimplementasikan sesuai dengan petunjuk teknis dari BPKP, karena ini adalah tugas yang diberikan kepada pemerintah desa oleh BPKP untuk difasilitasi dan dikelola oleh pemerintah desa sehingga kami yang ada di desa tidak perlu lagi membuat cara-cara baru dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban”*

Aplikasi Siskeudes yang dibuat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, telah memenuhi semua persyaratan teknologi yang ditetapkan BPKP. Kepatuhan terhadap kriteria teknologi BPKP memastikan kepatuhan otomatis terhadap standar pengelolaan keuangan desa. Kepatuhan terhadap kriteria teknologi BPKP memastikan kepatuhan otomatis terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa, termasuk materi pelengkap, seperti SPJ kegiatan dan peraturan desa (Perdes, Perkades, dan APBDes).

**Feedback (umpan balik)**

Umpan balik (*feedback*) aplikasi Siskeudes merupakan tanggungjawab dari BPKP, Kemendagri, dan DPMD selaku pengembang serta penanggungjawab dalam hal pengawalan penggunaan keuangan desa khususnya terkait dengan Dana Desa. Umpan balik (*feedback*) ini berguna untuk mengevaluasi laporan yang dihasilkan Siskeudes. Hal ini penting untuk perkembangan dari aplikasi Siskeudes.

*“Untuk umpan balik dari dinas ini alhamdulillah tidak ada, cuman tahun dulu-dulu ada sedikit masukan dari inspektorat sebab duluan baru-baru menggunakan aplikasi Siskeudes dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Gelangsar ini mulai menggunakan aplikasi siskeudes itu setelah mendapatkan pemerintah dari bupati untuk seluruh desa harus menggunakan siskeudes pada tahun 2017, memang pada tahun 2016 sudah ada beberapa desa yang menggunakan belum semuanya. Kenapa Desa Gelangsar baru mulai pada tahun 2017 menggunakannya karena ada beberapa hambatan seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana lainnya”*



Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sangat diuntungkan dengan adanya masukan mengenai penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan Aplikasi Siskeudes, bagaimanapun juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan, begitu juga dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, ketersediaan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi akurasi dan konsistensi.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat**

Pemerintah Desa merealisasikannya dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menyampaikan laporan keuangan yang memuat rincian pengelolaan keuangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kecamatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, juga menerima laporan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Negri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 70, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini mendukung penelitian Ngakil & Kaukab (2020), Iznillah et al., (2018), Ramli (2017), dan Wiguna (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaan teknologi.

Peneliti menggunakan ukuran-ukuran yang diusulkan oleh (Wiguna, 2020), Aeni M et al. (2022), Maharani & Akbar (2020), dan Ramli (2017) untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa:

#### **1. Akuntabilitas Vertikal**

Kepala Desa bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi atas Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dikenal sebagai pertanggungjawaban horizontal. Setiap akhir tahun, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat tentang realisasi atau pelaksanaan program atau kegiatan APBDes. Pertanggungjawaban vertikal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

*“Laporan pertanggungjawaban pencapaian APBDes dibuat setiap tahun dan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban yang kami serahkan kepada Bupati melalui camat setiap semester dan tahun. SPJ akan dibuat setiap tahun”*

Bendahara Desa sangat terbantu dengan adanya Siskeudes dalam membuat laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa, dan laporan tersebut dibuat secara menyeluruh dan tepat waktu. Namun, SPJ yang

tidak lengkap atau kurang lengkap seringkali menjadi tantangan yang dihadapi. Pemerintah Desa biasanya menyerahkan laporan pertanggungjawaban dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, kepada Pemerintah Kabupaten. Dokumen yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini termasuk foto laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten atau kota, foto dokumen APBDes, Perdes APBDes, laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan bukti transaksi uang desa (SPJ Kegiatan).

## 2. Akuntabilitas Horizontal

Masyarakat luas meminta pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Sebab, Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cukup lengkap dan tepat waktu, namun masih terkendala masalah kecukupan SPJ. Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pemerintah Desa dilakukan melalui diskusi dengan masyarakat, BPD, Perangkat Kewilayahan, tokoh agama, dan lainnya.

*"Untuk laporan pertanggungjawaban yang akan kami gunakan untuk melaporkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pertanggungjawaban kami lakukan biasanya pada bulan Desember dalam bentuk LKPPDes dan laporan keuangan dengan mengundang ketua BPD dan anggotanya, Tokoh Masyarakat, Kader, RT, dan PKK sebagai perwakilan masyarakat. Di akhir tahun, di bulan Desember, kami melakukan pertanggungjawaban. SPJ inilah yang sering ditunda-tunda."*

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas horizontal Pemerintah Desa sudah baik atau akuntabel karena dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya mengenai realisasi APBDes. Dokumen bahan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), foto-foto laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Perdes, dan bukti transaksi keuangan desa (SPJ) merupakan dokumen yang diperlukan untuk memperkuat pernyataan tersebut.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat**

Salah satu konsep yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara bebas dan menyeluruh tentang pencapaian APBDes, yang dapat ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pasal 39 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang transparansi menyebutkan bahwa Kepala Desa menginformasikan APBDes kepada masyarakat melalui media sosial. Setidaknya, informasi yang disediakan

mencakup (1) anggaran pendapatan dan belanja desa; (2) pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut; dan (3) alamat pengaduan. Peneliti menggunakan ukuran-ukuran yang diusulkan oleh Hasliani & Yusuf (2021), untuk menilai transparansi pengelolaan keuangan desa:

1. Tersedianya informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab.

Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan dan program yang telah diputuskan dalam APBDes adalah dengan membuka akses informasi yang transparan terkait pengelolaan keuangan. Dalam rangka menjaga keterbukaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menggunakan teknologi, melakukan diskusi, dan membuat spanduk yang menjelaskan APBDes dan penggunaannya. Dengan mengumpulkan para kepala desa dan menjabarkan APBDes dan pelaksanaannya, informasi diberikan melalui diskusi

*“Ada nilai keterbukaan, terbukti dengan seringnya ada papan pengumuman di desa yang mencantumkan anggaran dana desa saat ini dan tujuan penggunaannya. Selain baliho, kami menerima undangan setiap tahun untuk meninjau pengelolaan keuangan desa. Desa menyampaikan undangan kepada seluruh tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, pemuda, dan masyarakat. Untuk menjelaskan semua dana yang diperoleh dan sejauh mana pelaksanaan APBDes, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan semua tokoh lainnya di desa diminta untuk hadir. Seberapa baik pelaksanaan APBDes, apakah ada kendala, dll. Hal-hal yang lebih spesifik akan lebih mudah dipahami di sana. Agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut, desa juga mempostingnya di situs web, halaman Facebook, akun Instagram, dan bahkan tiktok.”*

Dengan menggambarkan penggunaan APBDes dan tantangannya, dapat disimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang jelas ketika melakukan masyarakat di kantor desa. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan informasi mengenai kegiatan dan program dari APBDes di situs web, laman Facebook, akun Instagram, dan Tiktok, dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dan memberikan saran untuk pelaksanaannya.

2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu

Agar penelitian ini dapat melihat transparansi dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan perwakilan Ketua RT, beliau mengatakan bahwa sebagai bentuk transparansi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mudah diakses, dapat diketahui, tersedia secara bebas, dan tepat waktu.

*“Ya dapat diakses oleh siapaun melalui website desa atau akun desa yang lain seperti akun facebook, instagram, tiktok ini untuk masyarakat milenial. Tapi untuk*

*masyarakat yang tua-tua kami sudah usahakan melakukan siaran lewat radio yang sudah beberapa kali tayang namun kami terkendala oleh biaya nya, di TVRI kami sudah tiga kali tayang untuk menjawab mengenai transparansi. Sehingga kita hanya bisa lewat akun-akun yang sering diakses oleh kaum melenial saja, namun informasinya alhamdulillah sudah sampai keluar negeri, contohnya teman-teman kita yang berada diluar negeri seperi di Malaysia, Saudi, Mesir sudah bisa mengetahui tentang pengelolaan keuangan Desa.untuk masyarakat yang tua-tua kan biasanya lebih suka tonton TV dan Radio, di TV Sudah beberapa kali di undang seperti di TV 9, TVRI”.*

Pernyataan diatas bahwa pemberian informasi yang dilakukan menggunakan akun desa pada media sosial yang memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Pemberian informasi secara *offline* dilakukan melalui pemasangan banner yang memberikan informasi tentang APBDDes dan penggunaannya dan melalui musyawarah dikantor desa dengan mengundang para tokoh-tokoh. Pemberian informasi melalui media sosial mudah dijangkau oleh semua orang bahkan bisa sampai keluar negri, namun hanya bisa dilihat oleh kaum melenial saja. Dari itu kepala dusun sebagai perwakilan dari masyarakat memberikan saran untuk memasang banner pada setiap dusun.

## **PEMBAHASAN**

Temuan-temuan berikut ini merupakan hasil dari penelitian tentang seberapa baik pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Desa Gelangsar sebagai sampel:

### **Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program**

Informasi yang dicari dalam template atau program sudah sesuai jika dilihat dari pemahaman atau kemahiran Bendahara Desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Setelah dibuat secara manual, informasi yang diperlukan dapat dengan mudah diupdate ke dalam template atau program Siskeudes. Indikator kecukupan informasi yang diperlukan dalam template atau program dengan melihat pengetahuan atau kompetensi operator Siskeudes dan ketersediaan informasi dapat dianggap efektif.

### **Kesesuaian jenis laporan**

Informasi yang dimasukkan ke dalam menu entri menentukan apakah jenis laporan siskeudes sudah sesuai. Didukung dengan konstruksi manual menggunakan Microsoft Excel dan aksesibilitas dokumentasi teknis aplikasi siskeudes. Kesesuaian pengungkapan dan pemenuhan persyaratan dapat ditentukan dengan menggunakan laporan yang dihasilkan oleh siskeudes sesuai dengan SAP. sehingga indikasi kesesuaian laporan tersebut efektif.

### **Ketepatan dan kepastian waktu laporan**

Pada ketepatan waktu dan kepastian waktu laporan dengan melihat waktu penginputan data siskeudes dilakukan setiap ada penarikan (SPJ) dan pelaporan keuangan menggunakan siskeudes dapat dikatakan tepat waktu. Namun hasil wawancara dengan

informan untuk laporan yang berupa kecukupan SPJ yang belum rampung, hal itu dapat di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

### **Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan**

Terkait kesesuaian persyaratan pelaporan, proses, dan tahapan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan telah sesuai, yaitu penggunaan aplikasi Siskeudes telah sesuai dengan syarat dan ketentuan tata cara pelaporan keuangan desa serta standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

#### 1. Umpan balik (*feedback*)

Penggunaan aplikasi Siskeudes sangat membantu pemerintah dalam membuat pertanggungjawaban dan memudahkan dinas seperti inspektorat dalam mengevaluasi bagaimana perkembangan pengelolaan keuangan desa dan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, sesuai dengan indikator permasalahan umpan balik dari inspektorat terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Karena BPKP terus melakukan pemutakhiran versi, maka hal ini menjadi masukan bagi BPKP sebagai pengembang untuk menyempurnakan program Siskeudes.

#### 2. Akuntabilitas Vertikal

Aplikasi siskeudes sangat membantu pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan yang dikirim oleh pemerintah desa ke pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih teliti dan tepat waktu. Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat memberikan dampak pada praktik akuntabilitas yang diterapkan secara vertikal. Untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan atau pengalaman dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

#### 3. Akuntabilitas Horizontal

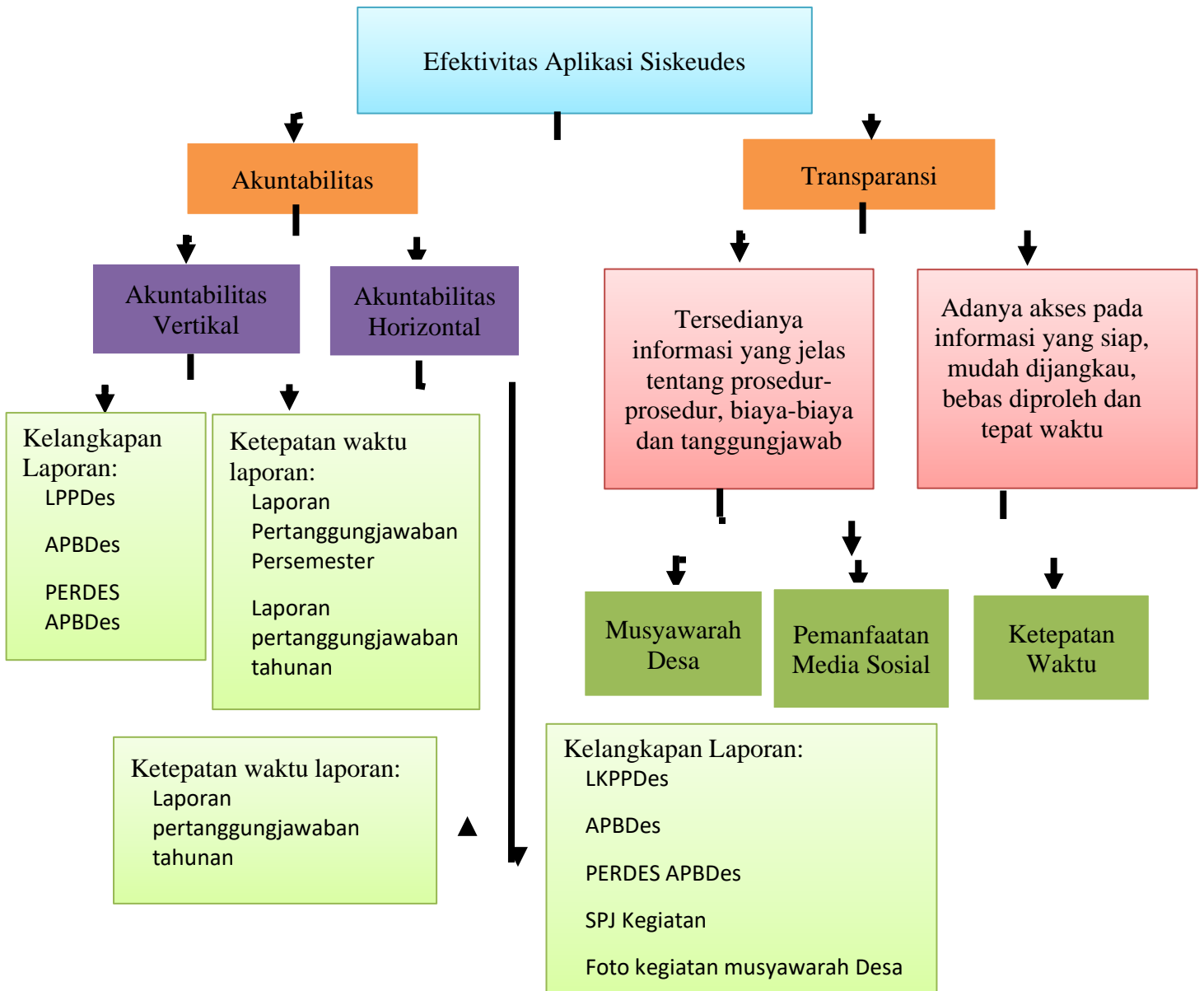
Akuntabilitas horizontal pemerintah Desa Gelangsar sudah menyeluruh dan tepat waktu dalam hal pelaporan pertanggungjawaban. Agar akuntabilitas horizontal pemerintah desa dapat dikatakan baik atau akuntabel, maka dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh BPD, perangkat daerah, tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya mengenai realisasi APBDes.

#### 4. Tersedianya informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab.

Informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan APBDes sudah baik karena pemerintah desa telah menyediakan informasi yang jelas tentang proses, pengeluaran, dan tanggung jawab. Upaya transparansi ini melibatkan berbagai pertimbangan. Selain itu, Pemdes juga memposting informasi tentang kegiatan dan inisiatif APBDes di situs web, Facebook, Instagram, dan TikTok.

#### 5. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Penggunaan aplikasi oleh pemerintah desa sangat membantu dalam meningkatkan keterbukaan dalam mengelola keuangan bagi seluruh masyarakat. Tepat waktu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat baik melalui diskusi maupun penggunaan media sosial yang berkembang di masyarakat. sehingga jelas apa yang dimaksud dengan akses informasi yang mudah, sederhana, tidak terbatas, dan cepat. Tersedianya akses informasi yang cepat, mudah, bebas biaya, dan tepat. Dengan pembahasan tentang hasil temuan penelitian, jadi dapat digambarkan temuan penelitian dengan bagan Gambar 1.



Gambar 1: Hasil Temuan Penelitian



## KESIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas aplikasi Siskeudes diukur menggunakan beberapa indikator yakni, kesesuaian informasi yang diminta dalam *template*/program, kesesuaian jenis laporan, kepastian dan ketepatan waktu laporan, kesesuaian persyaratan, prosedur dan tahapan laporan, dan umpan balik (*feedback*) sudah dikatakan efektif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes dapat membantu meningkatkan kualitas hasil laporan yang dihasilkan aplikasi tersebut. Adapun laporan yang dihasilkan oleh aplikasi siskeudes berupa laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kompilasi. *Output* dari siskeudes itulah yang digunakan untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat melalui BPD yang dilakukan secara lengkap dan tepat waktu. Adapun hasil penelitian dan uraian diatas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang diukur dengan indikator akuntabilitas vertikal dan horizontal sudah dikatakan akuntabel. Berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang diukur dengan indikator tersedianya informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu sudah transparan. Keterbatasan penelitian ini pada informasi yang diperoleh dengan melalui wawancara terstruktur dan keterbatasan waktu penelitian serta jumlah informan. Saran untuk peneliti selanjutnya, yakni menggunakan wawancara secara berbeda, memperpanjang waktu penelitian dan menambah jumlah informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa melakukan pemisahan jabatan antara Bendahara Desa dan Operator Desa untuk menghindari manipulasi data yang dapat menyebabkan penyelewengan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Safitri, K., Widodo, S., Purnama, H., & Sari, R. P. (2020). *The Important of Governmental Financial System Towards Information's Quality of Financial Statement (A Case Study From Purbalingga's Sub-District)*.
- Aeni M, H., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 67–81.
- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Kolaka Effectiveness of Village Financial System Application for Village Governments In Financial Reporting In Kolaka District. In *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* (Vol. 11, Issue 2).
- Asih, K. G., & Pradana, I. M. A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13).
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1). [Www.Bimakini.Com](http://www.Bimakini.Com)

- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability Of Village Fund Management Through Implementation Of The Village Financial System (Siskeudes). *Journal Of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Deliyanti, A. I., Manne, A., & Fajarina Laming, R. (2020). *Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Vol. 6, Issue 004).
- Dhika, P., Lajaba, Y., Halim, M., & Aspirandi, R. M. (2022). *Systematic Literature Review: Aplikasi Siskeudes Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kinerja Perangkat Desa*.
- Hasanah, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalon. *Japb*, 5(1), 215–228.
- Hasliani, Y. M., & Yusuf, M. (2021). Yume : Journal Of Management Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Yume : Journal Of Management*, 4(1), 179–192. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.234>
- Herawati, L., & Hayati, R. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. In *Japb* (Vol. 3). [www.keuangandesainfo.com](http://www.keuangandesainfo.com)
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1), 84–107.
- Loupatty, L. G. (2022). Evaluasipenerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 544–557.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020a). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Baj (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 1–20.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020b). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Baj (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 1–20.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. (N.D.).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.V3i2.1283>
- Peraturan Menteri Negri Dalam Negri Nomor 20. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nnomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Presdiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014tentangdesa*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor43 Tahun2014tentangperaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 1–91.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintahrepublikindonesianomor47 Tahun2015tentangperubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang*

- Peraturan Pelaksanaanundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Presiden Republik Indonesia*, 1–35.
- Pujiani, E. S., L, B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risma*, 2(3), 598–607.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 19-30.
- Restiti Nintyari, L., Kurniawan, P. S., & Atmadja, A. T. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Tabanan). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(2), 147-157.
- Sugiyono. (2021, December). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. *Alfabeta*, 272.
- Susanto, B., Aida, A. A., Rahayu, E. F., Salamah, K. L., Atiqoh, L. S., & Farida, I. (2022). Assistance in the establishment of BUMDes in Sonorejo Village, Candimulyo. *Community Empowerment*, 7(10), 1646-1650.
- Susanto, B., Pradana, F. S. A., Fitriana, R., Wulandari, N., Dina, F. A., & Galih, S. S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Menjadi Usaha Kreatif di Desa Duren. *Community Empowerment*, 6(3), 512-515.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 167-179.